



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	12.07.2018	MEMOR
WAKTU	11.10	06.15/k
PARAF	131	

KADA PERSANDIAN		
KOMINFO KEMENDAGRI		
TANGGAL	12.07.18	MEMOR
WAKTU	11.10	06.15/k
PARAF		ESI/T

29 Juni 2018

Nomor : 700/5794/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Informasi Pelaksanaan Diklat
Pembentukan Pengawas
Pemerintahan bagi PNS yang
Disesuaikan/Inpassing Tahun 2018

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota ✓
di
SELURUH INDONESIA

Dengan hormat diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/inpassing Tahun 2018 dengan menggunakan Pola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/inpassing untuk membekali para PNS yang telah Diinpassing agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk memangku Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
2. Target calon peserta diklat adalah Pejabat Fungsional P2UPD di lingkungan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah melalui proses inpassing dan telah diangkat/dilantik kedalam jabatan fungsional P2UPD;
3. Diklat dimaksud akan diselenggarakan sebanyak 8 (delapan) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang setiap angkatan, dan berlangsung selama 12 (dua belas) hari. Adapun tanggal pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Angkatan 1 dan 2, Tanggal 30 Juli s.d. 11 Agustus 2018;
 - b. Angkatan 3 dan 4, Tanggal 17 s.d. 29 September 2018;
 - c. Angkatan 5 dan 6, Tanggal 8 s.d. 20 Oktober 2018;
 - d. Angkatan 7 dan 8, Tanggal 29 Oktober s.d. 10 November 2018.
4. Materi Diklat antara lain : Gambaran Umum Jabatan dan Fungsional Pengawas Pemerintahan, Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Penerapan SPM dan NSP, Pengawasan Administrasi Umum, Pengawas Substansi Urusan Pemerintahan, Pengawas Dekon dan TP (Khusus Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat), Pengawasan Pengaduan Masyarakat, Dasar-Dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, Psikologi Pengawasan, Analisis Kasus, Pemaparan Hasil Analisis, Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan, Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah.
5. Persyaratan calon peserta diklat sebagai berikut : Surat Perintah dari Instansi Pengirim, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional P2UPD, Laptop, Pasphoto latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan Surat Keterangan Dokter.

KABUPATEN BANDUNG	
KANTOR KEPALA DAERAH	
12.05.13	1946
12	531/0

6. Biaya Penyelenggaraan Diklat sebesar Rp. 12.350.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Diklat sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan dibayarkan langsung kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri selanjutnya di setor ke Kas Negara;
 - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa tersebut pada saat penerimaan peserta;
7. Biaya perjalanan PP uang saku peserta selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditanggung Instansi pengirim;
8. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima Panitia Penyelenggara secara tertulis dari pimpinan Instansi/Satuan Kerja setempat paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan diklat;
9. Peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui radiogram paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan diklat.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri cq. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis melalui telp/fax (021) 7982659, atau email: plk.bpsdm2015@gmail.com atau Ibu Apriani Kartini HP. 081290879242.

Demikian untuk disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



SETYABUDI

Tembusan Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.